

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN INFLASI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

Iffah Rahayu Ningsih¹

Muslimin Kara²

Email: iffahrahayun99@gmail.com

¹ Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze how much influence government spending in the education, health and inflation sectors have on poverty and the human development index in South Sulawesi. By using time series data for the period 2001-2020 with the path analysis method. The calculation data in this study used the Amos version 21 program. The results of this study indicated that the results of this study indicate that government spending on health has an estimated value of 3.129 on the Human Development Index; the estimated value of government spending on education on HDI is 324.158; and -2.544 Inflation has an effect on HDI. Meanwhile, government spending on health has an estimated value of 139,938 for poverty; obtained an estimated value of -1.134 government spending on education on poverty; and -0.882 is the estimated value of the effect of inflation on poverty. Then the estimated HDI value for poverty is 1.224. Partially the variables of expenditure on government education and health had a positive and significant effect on the human development index in South Sulawesi. Inflation has a negative and significant effect on the Human Development Index in South Sulawesi. Government spending on education has a negative and insignificant effect on poverty in South Sulawesi. Government spending on health has a positive and significant effect on poverty in South Sulawesi. Inflation has a negative and insignificant effect on poverty in South Sulawesi. Poverty has a positive and insignificant effect on the Human Development Index in South Sulawesi.

Keywords: *Government Spending on Education, Government Spending on Health, Inflation, Human Development Index, Poverty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan inflasi terhadap kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*) selama periode tahun 2001-2020 dengan metode analisis jalur (*path analysis*). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program Amos versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki nilai estimasi sebesar 3,129 terhadap Indeks Pembangunan Manusia; nilai estimasi pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan terhadap IPM adalah sebesar 324,158; dan sebesar -2,544 Inflasi berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki nilai estimasi sebesar 139,938 terhadap Kemiskinan; diperoleh nilai estimasi sebesar -1,134 pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap kemiskinan; dan -0,882 adalah nilai estimasi pengaruh inflasi terhadap kemiskinan. Kemudian nilai estimasi IPM kepada kemiskinan adalah 1,224. Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh

ARTICLE INFO

Received 5 April 2023

Accepted 15 Mei 2023

Online 20 June 2023

*Correspondence: Iffah Rahayu

Ningsih

E-mail:

iffahrahayun99@gmail.com

negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Kesehatan, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah yang rumit, tidak hanya pada konsumsi serta tingkat penghasilan yang rendah, akan tetapi pada kesehatan serta tingkat pendidikan. Hal ini secara umum kontras dengan banyak negara lain di seluruh dunia (Amalia dkk., 2015; Ferezagia 2018). Terdapat hubungan penting antara kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kiha dkk., 2021; Hidayat & Woyanti 2021; Mahendra 2020). IPM merupakan salah satu penentu kesejahteraan dan terdiri dari beberapa faktor seperti standar kesehatan, pendidikan dan taraf hidup yang layak. Semakin rendah IPM suatu orang, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan yang di alami orang tersebut (Kiha dkk., 2021).

Adisasmitha (2015) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur kemiskinan penting untuk mempertimbangkan tidak hanya kekurangan makanan dan tingkat upah yang rendah, namun juga tingkat kesejahteraan, pelatihan dan perlakuan yang adil di bawah pengawasan hukum. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS dalam W. A. Saputra (2018), menyatakan bahwa tingkat kebutuhan tergantung pada penggunaan makanan sehari-hari sebesar 2.100 kalori untuk setiap individu (52 jenis produk dianggap untuk mengatasi contoh penggunaan yang lebih rendah dari masyarakat) dan non-makanan (45 jenis produk sesuai pengaturan umum), tanpa membedakan wilayah provinsi dan wilayah metropolitan). Hal ini adalah saran kesehatan yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari usia, status fisiologis, berat badan, jenis kelamin serta aktivitas fisik. Ini juga berlaku untuk individu yang berada di garis kemiskinan. Seperti yang ditunjukkan oleh bank dunia, kemiskinan diperkirakan dengan gaji \$2 setiap hari per individu.

Adisasmitha (2015) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur kemiskinan penting untuk mempertimbangkan tidak hanya kekurangan makanan dan tingkat upah yang rendah, namun juga tingkat kesejahteraan, pelatihan dan perlakuan yang adil di bawah pengawasan hukum. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS dalam w. A. Saputra (2018), menyatakan bahwa tingkat kebutuhan tergantung pada penggunaan makanan sehari-hari sebesar 2.100 kalori untuk setiap individu (52 jenis produk dianggap untuk mengatasi contoh penggunaan yang lebih rendah dari masyarakat) dan non-makanan (45 jenis produk sesuai pengaturan umum), tanpa membedakan wilayah provinsi dan wilayah metropolitan). Hal ini adalah saran kesehatan yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari usia, status fisiologis, berat badan, jenis kelamin serta aktivitas fisik. Ini juga berlaku untuk individu yang berada di garis kemiskinan. Seperti yang ditunjukkan oleh bank dunia, kemiskinan diperkirakan dengan gaji \$2setiap hari per individu.

Tabel 1 mengilustrasikan banyak penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan kategori miskin yang semakin menurun setiap tahunnya, tahun 2016 total penduduk miskin sebesar 807.038.445.651 jiwa kemudian pada tahun 2019 total penduduk miskin semakin menurun sebesar 767.806.891.435 jiwa akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah

penduduk miskin sebesar 776.830.672.661 jiwa. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga menyebabkan bertambahnya kuantitas masyarakat miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan (Jiwa)
Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2016	807.038.445.651
2017	813.079.875.132
2018	792.634.213.015
2019	767.806.891.435
2020	776.830.672.661
2018	792.634.213.015
2019	767.806.891.435
2020	776.830.672.661

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Nuriyah dkk (2017) menyatakan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan kemajuan manusia karena makin sedikit orang yang miskin, makin bagus juga nilai IPM-nya. IPM adalah indikator dengan cara apa masyarakat lokal meneruskan hasil pembangunan dalam hak mereka atas pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. IPM dirancang serta di diperkenalkan oleh PBB yang mendefinisikan bahwa IPM merupakan indeks dalam menakar mutu hasil dari penyusunan perekonomian, yaitu derajat pembangunan manusia (Aquariansyah, 2018). UNDP juga mengartikan IPM adalah sebuah teknik yang menambah komponen hidup masyarakat. Di Indonesia, memiliki kualitas talenta yang buruk hal ini kemudian yang menjadi kendala utama Prasetyoningrum & Sukmawati (2020). IPM adalah indeks komposisi yang mengukur tiga komponen eksklusif kesejahteraan suatu negara: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Tambunan, 2016).

Sesuai standar PBB, IPM memiliki empat standar yakni: klasifikasi sangat tinggi memiliki nilai IPM lebih dari 80, klasifikasi tinggi memiliki nilai IPM 70-79, klasifikasi menengah memiliki nilai IPM 60-79, dan klasifikasi rendah memiliki nilai yang berada di bawah nilai 59. IPM di Sulawesi Selatan masuk dalam klasifikasi tinggi namun jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus meningkat (Badan Pusat Statistik, 2020). Peningkatan IPM Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu dilakukan dan membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang perlu dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan IPM adalah pemerintah harus bisa mengambil tindakan untuk mendorongnya ke tahap yang bagus. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat tepat dan berpengaruh untuk mencapai tujuan penghasilan, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan APBN dan APBD (Setiawan & Fikriah, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan (Kiha dkk., 2021; Prasetyoningrum & Sukmawati, 2020; Sofilda dkk., 2014; Suliswanto, 2011). IPM berpengaruh buruk terhadap tingkat kemelaratan.

**Tabel 2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016-2020**

Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
2016	69,76%	0,88%
2017	70,34%	0,83%
2018	70,90%	0,80%
2019	71,66%	1,07%
2020	71,93%	0,38%
2018	71,66%	1,07%
2019	71,93%	0,38%
2020	71,66%	1,07%

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021)

Tabel 2 memperlihatkan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan dan nilai pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi setiap tahun antara 2016-2020 menurut metode baru. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia naik di tahun 2016 sebanyak 0,88% selanjutnya IPM tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,38%. Upaya pemerintah untuk meningkatkan IPM dan mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah, dapat diterapkan kebijakan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian dari total bunga, dan seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, demikian pula total permintaan (Koyongian dkk., 2019).

Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh langsung dan tidak langsung variabel terikat terhadap variabel bebas (Kusuma, 2019). Pada penelitian ini, juga memakai analisis metode *structural equation modeling* (SEM). SEM ini, merupakan suatu metode analisis *multivariate* yang menyatukan antara analisis faktor dan analisis jalur. Sehingga, menguatkan peneliti dalam meneliti dan memperkirakan secara bersama-sama. Kaitan antar variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen. Persamaan fungsional dalam penelitian ini dapat dibentuk sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_1 \quad (1)$$

$$Y_2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 Y_1 + \mu_2 \quad (2)$$

Keterangan: X_1 adalah realisasi dari total belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan yang diukur dalam Rupiah antara tahun 2010 sampai dengan 2020; X_2 merupakan realisasi dari total belanja Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kesehatan yang diukur dalam Rupiah antara tahun 2010 sampai dengan 2020; X_3 adalah laju indeks harga konsumen Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dalam skala persen periode 2010-2020; Y_1 merupakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dalam persen selama periode 2010-2020; Y_2 adalah jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dalam ribuan jiwa periode 2010-2020; β_0 adalah Konstanta untuk Y_1 ; dan α_0 adalah Konstanta Y_2 .

Hasil dan Pembahasan

Pengujian Metode *Path Analysis*

Uji data dengan memakai *path analysis* menggunakan uji asumsi yang terdiri dari: uji normalitas, uji evaluasi nilai residual, uji multikolinieritas, serta uji singularitas (Bahri & Zamzam, 2015).

Percobaan uji normalitas data adalah syarat utama untuk melakukan percobaan dalam memakai model *path analysis*. Tujuan dilakukan percobaan ini, agar dapat mengetahui apakah data terdistribusi secara baik atau tidak. Percobaan uji normalitas dalam *path analysis* memakai AMOS dikerjakan secara univariat dan multivariat. Data dapat dianggap baik, apabila nilai *cr skewness* dan *cr cortusis* di tiap-tiap indikator nilainya kurang dari 2,58.

Tabel 3: Uji Normalitas

Variabel	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
X ₁	5,885	6,046	0,137	0,25	-1,683	-1,536
X ₂	1,804	1,857	0,397	0,725	-1,115	-1,018
X ₃	2,04	8,61	0,209	0,382	-0,87	-0,794
Y ₁	63,63	71,93	0,439	0,801	-1,088	-0,993
Y ₂	767806	1111984	0,196	0,359	-1,657	-1,512
Multivariate					0,372	0,099

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 3 X₁ memiliki nilai c.r skew sebesar 0,250 dan c.r cortusis sebesar -1,536. Berarti hasil pengujian pada X₁ dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. Variabel X₂ mempunyai nilai c.r skew sebesar 0,725 dan c.r cortusis sebesar -1,018. Berarti hasil pengujian pada variabel X₂ dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. Variabel X₃ mempunyai nilai c.r skew sebesar 0,382 dan c.r cortusis sebesar -0,794. Berarti hasil pengujian pada variabel ini dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. Selanjutnya variabel IPM (Y₁) mempunyai nilai c.r skew sebesar 0,801 dan c.r cortusis sebesar -0,993. Dengan demikian hasil pengujian pada variabel IPM dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. Kemudian variabel kemiskinan (Y₂) mempunyai nilai c.r skew sebesar 0,359 dan c.r cortusis sebesar -1,512. Sehingga hasil pengujian pada variabel ini dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58.

Tabel 4. Uji Nilai Residual

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model)

	Kesehatan (X1)	Pendidikan (X2)	Inflasi (X3)	IPM (Y1)	Kemiskinan (Y2)
X ₁	0				
X ₂	-3,845	0			
X ₃	1,078	-1,458	0		
Y ₁	-3,852	-0,018	-1,447	-0,036	
Y ₂	-0,113	-3,823	1,02	-3,83	-0,225

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022)

Percobaan uji Amos selanjutnya adalah melihat output residu standar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai residu standar lebih dari 2,58 maka hasil terdeteksi adanya residual yang besar. Tabel 4 menjelaskan bahwa hasil *path analysis* di aplikasi Amos dapat disimpulkan bahwa hasil uji nilai residual variabel X_1 , X_2 , dan X_3 sebesar 0,000 yang berarti tidak terdapat residual karena nilai di bawah 2,58. Adapun nilai residual variabel Y_1 dan Y_2 masing-masing sebesar 0,036 dan sebesar -0,225 yang berarti tidak terdapat residual karena nilai juga berada di bawah 2,58

Uji multikolinieritas dan singularitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dan singularitas pada kombinasi tiap variabel. Indikatornya untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dan singularitas dapat dilihat dari nilai *determinant of the covariance matrix* yang betul-betul kecil dan menghampiri nilai nol. Pada hasil pengujian ini, nilai *determinant of the covariance matrix* yakni, 0,000. Hasil uji menunjukkan bahwa, besarnya *determinant of the covariance matrix* sampel mendekati nol. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil data uji coba yang digunakan terjadi multikolinieritas dan singularitas. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai korelasi antarvariabel masih dapat dikategorikan besar, walaupun terdapat beberapa nilai korelasi cenderung mendekati nilai nol. Dengan demikian maka asumsi multikolinieritas terpenuhi karena tidak terdapat multikolinieritas dalam data penelitian.

Tabel 5: Uji Multicolinierity dan Singularity

Sample Correlations (Group number 1)					
	Kesehatan (X1)	Pendidikan (X2)	Inflasi (X3)	IPM (Y1)	Kemiskinan (Y2)
X_1	1				
X_2	-0,882	1			
X_3	0,247	-0,334	1		
Y_1	-0,879	1	-0,342	1	
Y_2	0,999	-0,871	0,233	-0,868	1

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022)

Hasil Model *Path Analysis*

Percobaan uji *Path Analysis* adalah model analisis yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen dan endogen. Di mana, besaran nilai variabel laten diuraikan atau disintesis berdasarkan variabel yang diamati. Atau indeks yang membentuk variabel. Dengan menggunakan model analisis jalur, dapat menemukan hasil yang sesuai. Hal ini karena tidak semua variabel yang diamati ukuran variabel dapat menjelaskan variabel laten. Oleh karena itu, menggunakan analisis jalur memberikan *output* yang masuk akal dan tidak bias.

Tabel 6 menyajikan hasil olah data menggunakan Amos dapat dijelaskan bahwa: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki koefisien estimasi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 324,158. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan; Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki koefisien estimasi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3,129. Artinya, peningkatan

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan; dan inflasi memiliki koefisien estimasi negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar -2,544. Artinya, peningkatan inflasi tidak berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan;

Tabel 6: Nilai Estimasi Model *Path Analysis*

			Estimate	<u>C.R.</u>	Keterangan
Y1	<---	X1	324,158	***	Positif Signifikan
Y1	<---	X2	3,129	0,002	Positif Signifikan
Y1	<---	X3	-2,544	0,011	Negatif Signifikan
Y2	<---	X1	-1,134	0,257	Tidak Signifikan
Y2	<---	X2	139,938	***	Positif Signifikan
Y2	<---	X3	-0,882	0,378	Tidak Signifikan
Y2	<---	Y1	1,224	0,221	Tidak Signifikan

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022)

Tabel 6 juga mengindikasikan bahwasanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki koefisien estimasi negatif terhadap kemiskinan sebesar -1,134. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berdampak pada peningkatan kemiskinan di Sulawesi Selatan; Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki koefisien estimasi positif terhadap kemiskinan sebesar 139,938. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan di Sulawesi Selatan; Inflasi memiliki koefisien estimasi negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar -,882. Artinya, peningkatan inflasi tidak berdampak pada peningkatan kemiskinan di Sulawesi Selatan; dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki koefisien estimasi positif terhadap kemiskinan sebesar 1,224. Artinya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada hasil pengujian, Tabel 6 menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1) mempunyai besaran nilai koefisien yakni 324,158 dengan besaran nilai CR memiliki nilai koefisien estimasi sebesar 324,158 dengan nilai CR yakni $0,000 < 0,1$. Yang berarti, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah.

Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang pendidikan makin tinggi maka Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika belanja pemerintah bidang pendidikan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan turun. Standar hidup layak merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Standar hidup layak, mengilustrasikan kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk sebagai dampak dari pulihnya ekonomi. Untuk meningkatkan standar hidup layak, maka realisasi belanja pemerintah pada bidang pendidikan harus dirasakan tiap-tiap masyarakat. (Aquariansyah, 2018).

Penelitian ini, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Arifin (2015). Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini, juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kahang dkk., 2016; Rahim dkk., 2021; Wibowo, 2014) yang mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sangat berpengaruh dan signifikan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada hasil pengujian dalam Tabel 6 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, 3,129 dengan besaran nilai CR yakni, 0,002 < 0,1. Yang berarti, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang kesehatan makin tinggi maka Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika belanja pemerintah bidang kesehatan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan turun. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pake, Kawung dan Luntungan (2018) yang mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kahang dkk., 2016) yang mengatakan bahwa, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 6 memperlihatkan bahwa inflasi mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, -2,544 dengan nilai besaran CR yakni, 0,011 < 0,1. Yang berarti, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai negatif berarti menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, hal ini mengandung arti bahwa apabila variabel inflasi semakin tinggi, maka Indeks Pembangunan Manusia akan semakin menurun begitu pula sebaliknya apabila inflasi menurun maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat. Nilai negatif artinya, memperlihatkan kaitan yang tidak searah. Maksudnya, jika inflasi makin tinggi maka Indeks pembangunan Manusia akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya, jika inflasi mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia akan

mengalami peningkatan. Penelitian ini, diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Pangesti & Susanto, 2019) yang menyatakan bahwa, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Pada Tabel 6 nilai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, $-1,134$ dengan besaran nilai CR yakni, $0,257 > 0,1$. Yang berarti, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai negatif artinya, memperlihatkan kaitan yang tidak searah. Maksudnya, jika belanja pemerintah bidang pendidikan makin tinggi maka kemiskinan akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya, jika belanja pemerintah bidang pendidikan mengalami penurunan maka kemiskinan akan mengalami peningkatan. Pada hasil ini pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena jumlah orang miskin pada tahun 2020 meningkat sebesar 776.830.672.661 orang sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menurun sebesar Rp2.614.076.296.170 karena dana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dialokasikan ke bidang kesehatan untuk membiayai masyarakat yang terkena virus Covid-19 hal ini diduga menyebabkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Akan tetapi hasil data yang didapatkan bagus dan sesuai dengan teori yang ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Demak, Masinambo dan Londa (2020) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Manado.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Pada hasil pengujian, Tabel 3 mengilustrasikan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, $139,938$ dengan besaran nilai CR yakni, $0,000 < 0,1$. Yang berarti, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang kesehatan makin tinggi maka kemiskinan juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika belanja pemerintah bidang kesehatan mengalami penurunan maka kemiskinan juga akan turun.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fithri & Kaluge, 2017; Isman, 2020) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menurut (Fithri & Kaluge, 2017) belanja pemerintah pada bidang kesehatan, tidak diberikan kepada orang benar-benar membutuhkan hal ini mengakibatkan jumlah orang miskin makin bertambah apabila dinaikkan jumlah belanja pemerintah pada bidang kesehatan. Hal inilah, yang membuat tidak sebandingnya kenaikan kesehatan penduduk dengan kuantitas lapangan kerja. Masalah ini akan melahirkan angka kelahiran yang banyak serta terlahirnya keluarga miskin yang baru. Apabila angka kelahiran mengalami kenaikan, maka akan munculnya kepadatan penduduk yang meningkat dengan pesat. Akhirnya, pada masa akan

datang lapangan kerja perlu dinaikkan agar kuantitas penduduk yang terus naik tidak mengalami pengangguran serta mengurangi masyarakat miskin.

Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan

Pada hasil pengujian, Tabel 3 mengilustrasikan bahwa inflasi mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, $-0,882$ dengan besaran nilai CR yakni, $0,378 > 0,1$. Yang berarti, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai negatif artinya, memperlihatkan kaitan yang tidak searah. Maksudnya, jika inflasi makin tinggi maka kemiskinan akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya, jika inflasi mengalami penurunan maka kemiskinan akan mengalami peningkatan. Pada hasil ini inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena jumlah orang miskin pada tahun 2020 meningkat sebesar 776.830.672.661 orang sedangkan inflasi menurun sebesar 2,04% karena pada saat menyebarnya virus Covid-19 ini pemerintah melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menyebabkan kurangnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan inflasi menurun secara drastis hal ini diduga menyebabkan inflasi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Walaupun, penelitian ini tidak sinkron dengan teori terdahulu. Tetapi penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Barika, 2015; Kasim dkk., 2021) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut menandakan bahwa, mutu pertumbuhan ekonomi yang kepadatan relatif tidak bagus. Ini disebabkan, sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditunjang pada bidang konsumsi. Penyebab lainnya, yakni kurang maksimalnya Selain itu, kurang maksimalnya dari segi pemerataan penghasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kenaikan penghasilan berminat dirasakan oleh beberapa kelompok penduduk.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pada hasil pengujian, Tabel 3 mengatakan bahwa kemiskinan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, $139,938$ dengan besaran nilai CR yakni, $0,000 < 0,1$. Yang berarti, kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. Maksudnya, jika kemiskinan makin tinggi maka Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika kemiskinan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan turun. Pada hasil ini kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena jumlah orang miskin pada tahun 2020 meningkat sebesar 776.830.672.661 orang sedangkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia menurun sebesar 0,38% hal ini diduga menyebabkan kemiskinan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Hasil estimasi pada penelitian ini juga memberikan hasil yang selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Amalia dkk., 2015; Kiha dkk., 2021; Mirza, 2021) yang mengemukakan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi IPM apabila kemiskinan menghadapi penurunan karena kenaikan mutu pembangunan manusia. Jumlah kemiskinan akan menurun, apabila mutu pembangunan manusia, kesejahteraan penduduk miskin semakin bagus. Hal ini membuktikan, bahwa IPM mempunyai pengaruh dalam menurunkan jumlah orang miskin.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan; (2) Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan; (3). Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila inflasi meningkat maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan; (4) Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan; (5) Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan; (6) Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila inflasi meningkat maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan; dan (7) Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila kemiskinan meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. (2020). modal manusia dan pertumbuhan ekonomi". *Jurnal E-Mabis FE Unimal*, 11(3).
- Adelfina, & Jember, I. Made. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 - 2013. *E-Jurnal EP Unud*, 5(10), 1011–1025.
- Adisasmita, R. (2015). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Afriyanti, N. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar Tahun 2010-2018. *El-Barka*, 24–24.
- Amalia, R., Rahman Razak, A., Kunci, K., & Pemerintah, P. (2015). Pengaruh pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, 4(2), 183– 189.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Aquariansyah, F. (2018). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1–153.
- Arifin, M. Y. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks

- Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. *Digital Repositori Universitas Jember Digital Repositori Universitas Jember*, 3(3), 1–111.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.21009/jpeb.001.1.5>
- Badan Keuangan Aset Daerah. (2020). *Pengeluaran Pemerintah*.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Teori Kemiskinan*.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Teori Kemiskinan*. Jakarta. Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Manusia*.
- Bahri, S., & Zamzam, F. (2015). *Model Penelitian Kuantitatif Berbasis SEM-AMOS*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Barika. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Se Sumatera. *Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan, 1979–7338*, 27–36.
- Bastias, D. D. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 1–141.
- Beik, A. I. S., & Dwi, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 452. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162>
- David Rahmat, & Nasri Bachtiar. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A. ., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Modal Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 145–155.
- Djojohadikusumo, S. (1995). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Dumairy. (2016). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Fahmi, A. (2016). Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 4(2), 89–103. <https://doi.org/10.53978/jd.v4i2.38>
- Fahmi, A. H. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tahun 2011-2015. *Fakultas Ekonomi UII*, 72(10), 1–13.
- Fatimah, S. N. (2018). *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015*.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group).

- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). *Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan Dan Teknologi Terhadap IPM Di Indonesia*. 23, 122–137.
- Ismail, I. F., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2021). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado*. 21(03), 103–114.
- Isman, Fiqi Muhamad. (2020). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingginya Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Studi Kasus Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi)*. 2019.
- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 130-140, 18(2), 130–140.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Makro Islami*. (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA).
- Kasim, R., Engka, D. S. M., & Siwu, H. D. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 953–963.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Belu*. 2(07), 60–84.
- Koyongian, Christian Lendy, Kindangen, P., & Kawung, George m. . (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpekd.17664.19.4.2017>
- Kusuma, A. B. (2019). Pengaruh Kepuasan Anggota Atas Layanan BMT AT TA'WUN IAIN Metro Terhadap Peningkatan Tabungan. *Agama*.
- Lumowa, R. P., Noukoko, A. T., & Rompas, W. F. (2021). *Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019*. 21(7), 127–137.
- Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 20(September), 174–186. <https://doi.org/10.54367/jmb.v20i2.1010>
- Mangkoesebroto, & Guritno. (2016). *Ekonomi publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiatillah, R. (2021). *Pengaruh Inflasi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Covid-19 (Periode 2015-2020)*.
- Mirza, D. S. (2021). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 401. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p11>
- Mudrajad, K. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Sleman: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Notoatmojo, S. (2019). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuriyah, siti R., Muafiqie, H., & Junaedi, J. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Kemiskinan Terhadap Indeks pembangunan manusia di kabupaten Bojonegoro. *Journal of Public Power*, 1(2), 97–109.
- Output AMOS Yang Diolah Tahun. (2022). *Hasil AMOS*.

- Pake, S. D. S., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 13–22.
- Pangesti, I., & Susanto, R. (2019). *Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*. 3(2), 58–66.
<http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 06(02), 217–240.
<http://eprints.ums.ac.id/80956/>
- Purnama, N. I. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatra Utara. *Theoretical and Applied Genetics*, 7(2), 1–7.
- Rahim, A., Sutanty, M., & Anggita, P. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap IPM Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3), 276–284. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jeb>
- Rusydi, B. U., & Jafar, R. (2021). *Ekonomi Publik*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OaMjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=pengaruh+covid+terhadap+ekspor+impor+di+dunia&ots=TIrU0e9tXS&sig=uANu8jiQpr0BiR3MvAQT8rTn_3s
- Sanggalorang, S. M. M., Rumat, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Sulawesi Utara. <Http://Www.Sulutprov.Go.Id/Mengenal-Sulut/Sejarah/>, 15(02), 1–11.
- Saputra, B. E. (2020). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Indonesia. 4(1), 1–23.
- Saputra, W. A. (2018). Tingkat Kemiskinan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–77.
<http://eprints.undip.ac.id/28982/1/Skripsi018.pdf>
- Setiawan, A., & Fikriah, F. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 5(4), 212–221.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/17087>
- Sjafrizal. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Edisi 1. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofilda, E., Hamzah, M., & Sholeh, A. (2014). *Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression)*. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 06(06), 51–62.
- Sugiantari. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(1), D37–D41.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. 6, 41–54.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suliswanto, M. S. W. (2011). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan*, 8(2).
- Susanti, H., Moh. Ikhsan, & Widyawati. (2019). *Indikator-indikator Makro Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syam, S. F. (2014). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan*.
- Tambunan, T. T. . (2016). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarumingkeng, W. A., Rimate, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 82–95. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19789.19.6.2018>
- Todoro, & Semith. (2015). *Economic Development, Eight Edition*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Utama, B. T. (2017). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Komponen Dan Tahapan Pencapaian Hidup Layak Guna Mewujudkan Upah Layak* (p. 4). Skripsi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wahid, B. Al. (2017). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode (1996-2011)*.
- Wibowo, Mohamad Erhan. (2014). Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*, 1–85(1), 1–85.
- Yuliasih, F. W. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat*. 1–22.
- Zeru, M. A. (2018). *Assessment of Factors That Affect the Performance of Agricultural Production, in the Case of Amhara Region, Ethiopia*. *Agricultural Sciences*, 09(08), 1058–1069. <https://doi.org/10.4236/as.2018.98073>